

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan membaiknya stabilitas rantai pasokan, ketidakpastian makroekonomi masih tinggi akibat gejolak moneter yang berkepanjangan. Faktor-faktor seperti eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan strategis penghasil energi, kebijakan proteksionisme perdagangan, serta perlambatan pertumbuhan di negara-negara dengan historis performa makroekonomi kuat telah memunculkan potensi disrupsi pada pasar global. Tekanan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kemampuan integrasi pasar transnasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi global di tengah tantangan struktural yang semakin kompleks (Adrian and Natalucci 2020).

Saat ini, perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun inflasi global mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan membaiknya stabilitas rantai pasokan, ketidakpastian makroekonomi masih tinggi akibat gejolak moneter yang berkepanjangan. Faktor-faktor seperti eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan strategis penghasil energi, kebijakan proteksionisme perdagangan, serta perlambatan pertumbuhan di negara-negara dengan historis performa makroekonomi kuat telah memunculkan potensi disrupsi pada pasar global (Fernandes et al., 2023).

Dalam konteks geopolitik global saat ini, gejolak ekonomi menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakpastian yang dipicu oleh perlambatan ekonomi global, krisis energi, dan konflik geopolitik menuntut stabilitas politik yang kuat agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Negara dengan tingkat stabilitas politik tinggi umumnya memiliki kemampuan lebih besar untuk merespons tekanan eksternal, menjaga iklim investasi, dan

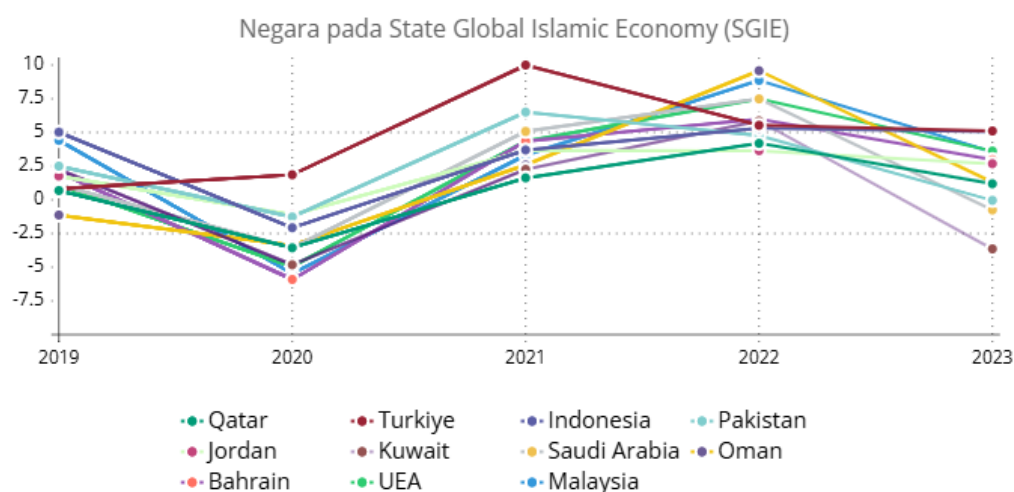
melindungi perekonomian domestik dari guncangan global (Kareem & Al, 2023). Sebaliknya, negara yang mengalami instabilitas politik cenderung menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lebih fluktuatif dan rentan terhadap perlambatan akibat melemahnya kepercayaan pasar.

Stabilitas politik berperan penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, khususnya melalui perlindungan hak kepemilikan, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara-negara anggota *State of Global Islamic Economy (SGIE)* seperti UAE, Qatar, dan Saudi Arabia menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik karena stabilitas politik yang terjaga, sehingga lebih mampu menarik investasi asing, menjaga konsumsi domestik, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Nairobi & Amelia, 2022). Sebaliknya, negara-negara SGIE dengan tingkat stabilitas politik yang lebih rendah, seperti Sudan, Pakistan, dan Iran, menghadapi tantangan besar berupa penundaan investasi, penurunan produktivitas, dan risiko perlambatan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan stabilitas politik menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi di negara-negara SGIE, termasuk Indonesia, dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Ketidakstabilan politik merupakan salah satu faktor utama yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SGIE. Ketidakstabilan tersebut, yang dapat berupa konflik bersenjata, perubahan rezim yang tidak terprediksi, protes sosial berskala besar, hingga ketegangan antarnegara, menciptakan ketidakpastian yang tinggi di pasar global (Lucifora & Moriconi, 2015). Ketidakpastian ini menurunkan tingkat kepercayaan investor, menyebabkan penurunan investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*), memperlambat perdagangan internasional, serta mendorong volatilitas pada pasar keuangan. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi karena berkurangnya aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi.

Menurut proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan melambat menjadi 2,8%, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,0%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh ketegangan perdagangan internasional dan ketidakpastian kebijakan, terutama yang

berasal dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan negara-negara lain (International Monetary Fund 2023). Perlambatan ini turut memengaruhi negara-negara anggota SGIE yang memiliki keterkaitan erat dengan arus perdagangan dan investasi asing langsung (FDI). Negara-negara dalam kelompok SGIE menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas politik dan konsistensi kebijakan domestik di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Ketidakstabilan politik atau perubahan kebijakan yang tidak terprediksi dapat memicu penurunan investasi, menghambat pertumbuhan sektor riil, dan menurunkan daya saing dalam ekonomi syariah global, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi pada negara SGIE periode 2019-2023

Sumber : *State Global Islamic Economy Report 2019-2023*

Gambar 2 menunjukkan dimana kondisi perekonomian pada negara yang terhimpun dalam laporan *State Gblal Islamic Indicator* mengalami penurunan secara global. Kebijakan moneter kontraktif telah meningkatkan biaya pinjaman (*cost of borrowing*), yang pada gilirannya memperlambat laju investasi dan konsumsi (Javaid, 2024). Dari perspektif makroekonomi, ketidakstabilan politik meningkatkan risiko negara (*country risk*) yang pada gilirannya meningkatkan biaya modal dan menurunkan insentif bagi dunia usaha untuk berekspansi. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak optimal, mengurangi produktivitas, serta memperburuk efisiensi pasar (Rivera-Batiz, 2002).

Vioriza Qiyaski Buchari, 2025

HUBUNGAN DINAMIS ANTARA STABILITAS POLITIK, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, DAN EKOSISTEM SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA TOP 14 STATE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY PERIODE 2014-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penurunan FDI sebagai akibat dari ketidakstabilan politik membawa dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. FDI tidak hanya menjadi sumber penting bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sektor produktif, tetapi juga berkontribusi terhadap transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan konektivitas ekonomi global (Almfraji & Almsafir, 2014). Dengan berkurangnya FDI, negara kehilangan salah satu motor utama akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih lambat, tingkat pengangguran meningkat, dan daya saing ekonomi menurun.

Studi empiris Septiantoro et al., (2020) menunjukkan bahwa setiap kenaikan ketidakstabilan politik secara signifikan menurunkan volume FDI. Dalam jangka panjang, kurangnya investasi asing mempersempit peluang peningkatan produktivitas nasional, memperlambat inovasi, dan mengurangi kapasitas negara untuk bergerak menuju ekonomi berbasis nilai tambah tinggi. Selain itu, defisit FDI sering memperparah ketergantungan terhadap utang luar negeri, yang pada akhirnya meningkatkan risiko fiskal dan memperlemah ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal (Widya & Rabbany, 2023).

Secara global, arus masuk investasi asing langsung (FDI) mengalami penurunan sebesar 12% pada tahun 2021-2022, hingga mencapai nilai US\$1,3 triliun akibat ketidakstabilan geopolitik dan ketatnya kebijakan moneter global. Meskipun demikian, investasi yang terkait dengan ekonomi Islam menunjukkan pertumbuhan eksponensial sebesar 128%, dari US\$11,4 miliar (2021/22) menjadi US\$25,9 miliar (2022/23), mencerminkan ketahanan sektor halal dalam menghadapi turbulensi ekonomi (SGIER, 2023). Dalam konteks tersebut, sektor ekonomi Islam menawarkan potensi yang semakin menarik sebagai alternatif investasi yang resilien.

Secara umum, ekonomi Islam menunjukkan ketahanan yang relatif lebih tinggi terhadap gejolak global dibandingkan sektor keuangan konvensional. Prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan investasi berbasis aset nyata, larangan terhadap spekulasi berlebihan (gharar), serta keadilan dalam transaksi keuangan menjadi faktor-faktor yang meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan sektor ini (Gassouma, 2023). Oleh karena itu, sektor ekonomi Islam berpotensi memainkan

peran strategis dalam memperluas basis FDI global ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan etis. Dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global, penguatan kerangka keuangan syariah, inovasi instrumen investasi syariah, serta harmonisasi standar regulasi internasional menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi Islam terhadap pertumbuhan FDI global.

Dalam kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, industri halal telah memainkan peran yang semakin penting sebagai kontributor utama terhadap pertumbuhan FDI syariah (Prayuda et al., 2023). Industri halal mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga fesyen dan logistik, dengan total nilai ekonomi global yang diproyeksikan mencapai lebih dari USD 3 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan pesat industri halal menarik perhatian investor asing yang mencari peluang di pasar yang tidak hanya besar tetapi juga loyal dan terus berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan (Kamila, 2021). Faktor kunci di balik ekspansi ini adalah pertumbuhan demografi Muslim yang signifikan disertai komitmen kuat terhadap prinsip konsumsi halal. Lebih dari itu, daya tarik industri ini melampaui batas komunitas Muslim, seiring meningkatnya preferensi global terhadap produk halal yang dianggap beretika seperti bebas kekejaman (*cruelty-free*) dan ramah lingkungan sebagai respons atas kesadaran keberlanjutan.

Kontribusi industri halal terhadap FDI ekonomi Islam tidak hanya meningkatkan volume investasi, tetapi juga memperluas cakupan sektor yang terlibat dalam ekonomi berbasis prinsip syariah (Azam & Abdul, 2020). Dengan permintaan global terhadap produk halal yang terus meningkat, industri ini berfungsi sebagai motor pertumbuhan baru yang memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi Islam dalam lanskap investasi global yang penuh tantangan. Secara keseluruhan, di tengah ketidakpastian geopolitik global, sektor ekonomi Islam didukung oleh pertumbuhan industri halal menawarkan jalur investasi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan riil (Hamid et al., 2019). Oleh karena itu, FDI di sektor ekonomi Islam tidak hanya mempertahankan stabilitas arus modal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap transformasi ekonomi global menuju model pertumbuhan yang lebih inklusif, etis, dan resilien.

Meskipun ada potensi perkembangan positif, industri halal menghadapi ketidakstabilan politik global yang dapat membawa tantangan tersendiri, terutama dalam bentuk perubahan kebijakan perdagangan akibat proteksionisme dan perang dagang antarkekuatan ekonomi besar. Dinamika ini berpotensi menghambat distribusi dan produksi produk halal secara global, baik melalui pembatasan akses pasar maupun ketidakpastian regulasi yang memengaruhi rantai pasok bersertifikasi (Azam & Abdullah, 2020).

Dalam kajian pembangunan ekonomi modern, stabilitas politik diakui sebagai faktor mendasar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Marlina et al., 2019). Stabilitas politik menyediakan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta keamanan sosial yang menjadi landasan utama bagi aliran Investasi Asing (Juliana, et al. 2018). Kerangka ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Daron Acemoglu dalam *Why Nations Fail* (2012), di mana ia menekankan bahwa kualitas institusi politik menjadi faktor kunci dalam menentukan performa ekonomi suatu negara. Menurut Acemoglu et al., (2019), institusi politik yang inklusif yang menjamin partisipasi luas, akuntabilitas, dan supremasi hukum mendorong lahirnya institusi ekonomi yang inklusif pula, yang memberikan insentif untuk investasi, inovasi, dan kewirausahaan (Acemoglu et al., 2003).

Stabilitas politik berperan ganda sebagai sinyal rendahnya risiko bagi investor internasional sekaligus cerminan kekuatan institusional dalam menegakkan aturan ekonomi yang adil dan transparan (Sabir et al., 2019). Negara dengan stabilitas tinggi lebih mampu menarik FDI jangka panjang yang produktif dan mendukung sektor strategis, sedangkan ketidakstabilan politik cenderung mendorong aliran investasi spekulatif dengan kontribusi terbatas terhadap pertumbuhan (Le et al., 2024). Sejalan dengan itu, Kahf (2022) menekankan pentingnya ekosistem ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial, di mana stabilitas politik menjadi fondasi terciptanya tata kelola ekonomi beretika dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat

Empirisnya, studi-studi seperti Busse and Hefeker (2007) menunjukkan hubungan positif yang kuat antara indikator stabilitas politik, volume FDI, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka teori Acemoglu, hubungan ini diperkuat

dengan analisis bahwa tanpa institusi politik yang inklusif dan stabil, peluang untuk mengonversi aliran FDI menjadi pertumbuhan ekonomi yang luas dan berkelanjutan akan sangat terbatas.

Pertanyaan mengenai pengaruh stabilitas politik terhadap investasi asing langsung (FDI), pembentukan modal tetap bruto (GFCF), dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi perdebatan akademis yang relevan (Kim 2010); (Boamah et al., 2018; Fredriksson & Svensson, 2003; Kesar et al., 2023) (Alisena, et al. 1996); (Feng 1997). Merujuk pada kajian (Paldam, 1998), pertumbuhan ekonomi diyakini meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mendorong penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan memperkuat stabilitas politik (Bashir, 2014). pertumbuhan justru memicu perubahan struktural yang kompleks dalam masyarakat, seperti kesenjangan sosial atau dinamika kekuasaan, yang berpotensi memunculkan ketidakstabilan politik (Wijaya & Himmawan, 2021).

Dialektika ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik bersifat nonlinier, di mana keberlanjutan FDI dan GFCF sebagai motor pertumbuhan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola dampak transformasi ekonomi. Hasil studi yang dilakukan (Dinh et al., 2019) mengungkapkan bahwa investasi asing langsung (FDI) memiliki pengaruh yang positif signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan tersebut mendukung penelitian sebelumnya bahwa investasi asing langsung (FDI) memiliki pengaruh positif dalam jangka panjang (Almfraji & Almsafir, 2014; Benjamin Badeji & Olufunsho Abayomi, 2011; Borensztein et al., 1998; Joo & Shawl, 2023; Wang et al., 2022).

Dalam temuan penelitian (Cebula, 2011) menyelidiki dampak dari sepuluh bentuk stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD. Dengan menggunakan estimasi panel least squares dan estimasi panel two-stage least squares, penulis menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi ditemukan dipengaruhi secara positif oleh stabilitas politik. Hubungan tersebut didukung oleh temuan yang dilakukan (Azam, 2016; Chebli & Saidi, 2024; Prastyo et al., 2024; Purba & Hariyadi, 2023a; Radu, 2015; Uddin et al., 2017; Yu & Jong-A-Pin, 2020). Tetapi hubungan tersebut kontradiktif dengan hasil temuan (Aisen & Veiga, 2013; Wijaya & Himmawan, 2021) menemukan hubungan negatif antara ketidakstabilan

politik dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik ekonometrik data panel tingkat lanjut, sistem GMM, pada 169 negara selama periode 1960-2004; ditemukan pula bahwa ketidakstabilan politik secara signifikan menurunkan tingkat pertumbuhan PDB.

Dampak FDI terhadap *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)* tidak dapat diabaikan, mengingat investasi asing langsung berperan krusial dalam mendorong akumulasi modal fisik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan modernisasi teknologi. Hal tersebut sesuai temuan sebelumnya yang dilakukan (Rahmadiani et al., 2023) (Ulussever, 2010) (Almalik et al., 2024) (Emako et al., 2023) (Ndikumana & Verick, 2008) (Morrissey & Udomkerdmongkol, 2012) (Amighini et al., 2017), dimana FDI dapat meningkatkan GFCF melalui pembiayaan infrastruktur dan transfer teknologi, tetapi efeknya bergantung pada kualitas institusi.

Lebih lanjut, signifikansi stabilitas politik bagi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan manusia telah secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhsammad SAW. Berdasarkan hal tersebut, landasan teoretis stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah (Juliana, et al. 2018). Secara bersamaan, (Gassouma, 2023) menyelidiki peran sistem berkelanjutan berbasis agamakhususnya Islam dalam konteks stabilitas ekonomi. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan Islam tidak hanya mampu mengurangi praktik korupsi, tetapi juga mencapai keberlanjutan ekonomi secara lebih efektif dibandingkan mekanisme keberlanjutan tradisional. Salah satu manifestasi konkret ekonomi Islam adalah pengembangan industri halal yang dalam satu dekade terakhir menjadi poros utama pertumbuhan ekonomi global (Adamsah & Subakti, 2022).

Dengan demikian, konsep stabilitas politik tampaknya menjadi variabel kunci yang terkait dengan variabel lain yang dapat berdampak pada FDI dan GFCF dan selanjutnya pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia memang telah banyak dilakukan. Namun seringkali penelitian tersebut dikaji dari aspek makroekonomi konvensional. Dan belum mempertimbangkan resiliensi dari kontribusi sektor ekonomi Syariah pada

Vioriza Qiyaski Buchari, 2025

HUBUNGAN DINAMIS ANTARA STABILITAS POLITIK, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, DAN EKOSISTEM SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA TOP 14 STATE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY PERIODE 2014-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian. Dalam studi ini, penulis akan mengeksplorasi data mengenai stabilitas politik, korupsi, tata kelola publik, dan pengangguran untuk menguji hubungan antara FDI, GIEI, dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena pentingnya memahami kontribusi sektor industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara *State Global Islamic Economy*, terutama di tengah tantangan kondisi geopolitik global yang terguncang dan memberikan dampak besar pasar rantai pasok global (Putra et al., 2023). Selain itu, relevansi penelitian ini semakin tinggi mengingat meningkatnya permintaan global terhadap produk halal serta pentingnya mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), pertumbuhan ekonomi (Prayuda et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur dalam beberapa cara: Pertama, berbeda dengan literatur pertumbuhan ekonomi yang ada, makalah ini mempelajari negara-negara pada *State Global Islamic Economy*. Kedua, untuk membahas dampak FDI dan GIEI terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi, pengangguran, dan faktor politik digunakan sebagai variabel. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stabilitas politik, FDI, GIEI dan PDB serta beberapa faktor lain dalam konteks negara-negara pada *State Global Islamic Economy*. Berdasarkan pemaparan diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Hubungan Dinamis Antara Stabilitas Politik, *Foreign Direct Investment*, Dan Ekosistem Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Top 14 *State Global Islamic Economy* Periode 2014-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konflik global perang Rusia-Ukraina berdampak pada pembangunan ekonomi dunia yang memperburuk stabilitas ekonomi dan memicu inflasi di berbagai negara sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Anguelov, 2021).
2. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan melambat menjadi 2,8%, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,0%. Penurunan

ini sebagian besar disebabkan oleh ketegangan perdagangan internasional dan ketidakpastian kebijakan (Ritahi, 2024)

3. Ketegangan politik antarnegara (misalnya AS–China) mengganggu rantai pasok internasional, menekan produksi dan efisiensi ekonomi. (Shahzad & Al-swidi, 2025)
4. Peraturan yang berubah-ubah membuat pelaku bisnis kesulitan dalam merencanakan investasi jangka panjang. Sehingga menurunkan tingkat investasi asing. (Wijaya & Himmawan, 2021)
5. Negara dengan stabilitas politik rendah sering mengalami tingkat korupsi yang tinggi, Korupsi yang tinggi dalam birokrasi menyebabkan inefisiensi dan menghambat pertumbuhan ekonomi Islam. (Kumar et al., 2024)
6. Ketidakstabilan politik juga meningkatkan risiko krisis perbankan dengan terjadinya krisis perbankan meningkat 2,5 kali lipat di negara-negara yang mengalami konflik (Cox & Weingast, 2018)
7. Negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik berat tercatat mengalami penurunan FDI hingga 20–30% dibandingkan dengan periode stabil. (Kurecic & Kokotovic, 2017)
8. Konflik internal atau hubungan diplomatik yang buruk dapat mengganggu rantai pasokan global produk Halal. Serta mengganggu berbagai sektor industry perdagangan. (Mbukanma et al., 2019)
9. Proses administrasi yang lambat dan regulasi yang tumpang tindih menghambat perizinan usaha dan investasi karena birokrasi yang berbelit dalam pemerintahan. (Di & Oki, 2022)
10. Ketegangan politik antarnegara juga dapat berdampak pada perdagangan produk halal dapat menghambat distribusi produk halal di pasar global. (Javaid, 2024)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang dimuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat *Foreign Direct Investment*, *Gross Fixed Capital Formation*, Stabilitas Politik, *State Fragility*, *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, *Global Islamic Economy Indicator*, dan Pertumbuhan Ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
2. Bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
3. Bagaimana pengaruh *Gross Fixed Capital Formation* terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
4. Bagaimana pengaruh Stabilitas Politik terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
5. Bagaimana pengaruh *State Fragility* terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
6. Bagaimana pengaruh *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
7. Bagaimana pengaruh *Governance Effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?
8. Bagaimana pengaruh *Global Islamic Economy Indicator* terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara *State Global Islamic Economy*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Fokus penelitian ini mencakup pengaruh variabel stabilitas politik, investasi langsung asing, kontribusi ekonomi islam pada sektor halal, dan beserta faktor politik lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dalam beberapa cara: Pertama, berbeda dengan literatur pertumbuhan ekonomi yang ada, makalah ini mempelajari negara-negara pada *State Global Islamic Economy*. Kedua, untuk membahas dampak FDI dan GFCF serta GIEI terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi, pengangguran, dan faktor politik digunakan sebagai variabel. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stabilitas politik, FDI, GFCF, GIEI dan PDB serta beberapa faktor lain dalam konteks negara-negara *State Global Islamic Economy*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat secara teoritis maupun praktis yang diharapkan dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Peneliti dan Calon Peneliti

Sebagai pemahaman holistik tentang dinamika pertumbuhan dengan memberikan kerangka teoritis yang mengintegrasikan faktor politik (stabilitas, tata kelola, korupsi) dan ekonomi (FDI, GFCF, GIEI) untuk menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi inklusif dalam konteks ekonomi syariah. Dan juga membangun validasi model pertumbuhan Islam dengan menguji relevansi model pertumbuhan berbasis prinsip Islam, seperti peran stabilitas politik dan keuangan syariah, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini memperkaya kajian akademis tentang ekonomi Islam dengan menganalisis hubungan antara stabilitas politik, FDI, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara State Global Islamic Economy (SGIE), yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a) Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah

Menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan stabilitas politik, mengurangi korupsi, dan memperbaiki tata kelola publik guna menarik lebih banyak FDI dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b) Panduan bagi Pelaku Industri Halal

Memberikan wawasan tentang risiko geopolitik dan cara mengatasi gangguan rantai pasokan global, termasuk diversifikasi pasar dan pemanfaatan e-commerce. Dan juga mendorong inovasi dalam produk halal untuk menjangkau konsumen non-Muslim melalui pendekatan berbasis keberlanjutan dan etika.

c) Arahan bagi Investor Asing

Mengidentifikasi negara-negara SGIE dengan stabilitas politik tinggi dan kebijakan pro-investasi sebagai destinasi prioritas. Serta memetakan potensi sektor ekonomi halal (seperti keuangan syariah, pariwisata, dan farmasi) yang menjanjikan return investasi optimal.

d) Penguatan Daya Saing Global

Membantu negara-negara SGIE meningkatkan peran mereka dalam industri halal global melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan kolaborasi internasional.